
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG

Ajeng Hasti Widya¹, Agisthia Lestari^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang
Email: agisthialestari10103@unpam.ac.id²

*Korespondensi: agisthialestari10103@unpam.ac.id

(Submission 14-11-2025, Revisions 28-11-2025, Accepted 05-12-2025)

Abstract

This study was conducted to determine the level of community participation in monitoring public information disclosure in Cikande Village, Serang Regency, for the period 2022–2024, using a quantitative approach with a survey method of 100 respondents determined using the Slovin formula at a 10% margin of error. The research instrument was a questionnaire based on the UMEGA model, and analysis was performed with the assistance of SmartPLS software. The results show that community participation has a significant influence, although it remains in the moderate category, as reflected in the achievement of the Banten Public Information Openness Index (IKIP) for 2021–2022. Hypothesis testing reveals that the indicator of the community participation variable, namely information accessibility, has a significant effect on accountability with a t -statistic value of $3.928 > 1.96$ and a p -value of 0.000 . Furthermore, the community involvement indicator also shows a significant influence with a t -statistic value of $3.052 > 1.96$ and a p -value of 0.002 . These two indicators are the main determinants in driving public information openness and enhancing the accountability of government administration. Factors such as education, economic status, and technology access strengthen participation; however, infrastructure limitations and low social awareness remain challenges. This study recommends strengthening information access, improving technological facilities, and expanding variables in future research so that the findings can be generalized more broadly and support transparent and accountable governance practices.

Keywords: *Public Participation, Public Information Disclosure, Oversight*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, periode 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%. Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis model UMEGA dan dianalisis dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh signifikan, meskipun masih berada pada kategori moderat, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Banten tahun 2021–2022. Uji hipotesis memperlihatkan bahwa indikator variabel partisipasi masyarakat, yaitu aksesibilitas informasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai *t statistics* 3,928 > 1,96 dan *p-value* 0,000. Selain itu, indikator keterlibatan masyarakat juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai *t statistics* 3,052 > 1,96 dan *p-value* 0,002. Kedua indikator tersebut menjadi penentu utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Faktor pendidikan, ekonomi, dan akses teknologi memperkuat partisipasi, namun keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran sosial tetap menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan akses informasi, peningkatan sarana teknologi, serta perluasan variabel dalam studi selanjutnya agar hasil dapat digeneralisasi secara lebih luas dan mendukung praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Keterbukaan Informasi Publik; Pengawasan; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi semakin menghadapkan masyarakat pada kebutuhan untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat dan relevan. Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang demokratis dan transparan, keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama yang harus dipenuhi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akses terhadap informasi publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Stiglitz, 2002; Meijer, 2013). Konsep ini tidak hanya menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia mengatur hak atas informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik (Kominfo, 2008). Meskipun kerangka hukum telah disiapkan, namun implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Tingkat keterbukaan informasi di banyak daerah, terutama pada level desa, masih tergolong rendah. Data dan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sering kali tidak tersedia atau sulit diperoleh. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan warga.

Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang telah melakukan upaya untuk menyediakan informasi publik. Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat tantangan, terutama tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak mereka sebagai warga negara. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi penghalang

dalam mengakses informasi secara efektif. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan antara apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan kenyataan yang ada di lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan informasi publik faktor penting dalam keterbukaan. Namun, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Secara struktural, minimnya fasilitas dan saluran komunikasi untuk menyampaikan aspirasi membuat masyarakat menjadi merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun secara kultural, adanya pandangan bahwa suara individu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah, juga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini menciptakan siklus di mana rendahnya partisipasi menyebabkan rendahnya akuntabilitas, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Arnstein, 1969; Pretty, 1995; Fung, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta implikasinya terhadap kualitas keterbukaan informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara teoretis, partisipasi masyarakat merupakan konsep fundamental dalam kajian demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Arnstein (1969), misalnya, menegaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan mulai dari manipulasi hingga kontrol warga (*citizen control*), di mana semakin tinggi tangga partisipasi, semakin besar pula kekuasaan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Ia menyebut rumusan ini sebagai *ladder of citizen participation*. Sementara Pretty (1995), memperluas pemahaman mengenai variasi bentuk partisipasi melalui tipologi partisipasi yang meliputi partisipasi pasif, konsultatif, partisipasi interaktif, hingga partisipasi mandiri.

Fung (2015) memperkenalkan *democracy cube*, yaitu kerangka analitis yang menjelaskan bagaimana kualitas partisipasi dipengaruhi oleh tiga dimensi utama: siapa yang terlibat, bagaimana proses komunikasi berlangsung, dan sejauh mana partisipasi berdampak pada keputusan publik. Ketiga kerangka teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menegaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya di tingkat lokal desa.

Penelitian menilai bahwa peningkatan akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi aktif, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan informasi publik bukan hanya akan memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga akan

meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan warga, menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan daerah (Dahl, 1989; Putnam, 1993).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan melakukan pengukuran variabel dan penentuan populasi sampel. Pelaksanaan pengumpulan data ini melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti pemilihan informan dan pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data (Sugiyono, 2019; Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian ini memiliki ruang lingkup tertentu yang secara geografis dibatasi pada wilayah administrasi Desa Cikande. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengurangi variasi yang tidak relevan dan kemungkinan mengaburkan hubungan antar variabel dengan cara mengontrol dapat meningkatkan validitas internal penelitian, sehingga hubungan sebab-akibat yang ditemukan lebih meyakinkan dan andal (*reliable*). Intinya, penelitian ini fokus pada lingkup tertentu untuk menghasilkan temuan yang lebih tajam dan kesimpulan yang kuat daripada penelitian yang mencoba membahas segala sesuatu.

Dengan demikian, seluruh proses pengumpulan data, observasi, serta analisis difokuskan pada desa tersebut tanpa melibatkan wilayah lain di Kabupaten Serang maupun daerah lain di Indonesia. Demikian pula dengan periode waktu, penelitian mencakup kondisi keterbukaan informasi publik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam dua tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2024. Analisis mengenai keterbukaan informasi juga dibatasi pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta regulasi daerah yang relevan.

Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi dalam pengawasan serta pengambilan keputusan terkait program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Cikande.

• **Penentuan Responden**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk terbanyak ada di Desa Cikande dengan jumlah penduduk 22.641 jiwa dari data Kecamatan Cikande yang mencakup 59.501 orang laki-laki dan 58.023 orang perempuan, dengan total populasi sekitar 117.524 jiwa. Data ini memberikan gambaran demografis yang penting untuk memahami karakteristik responden serta aksesibilitas informasi yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada seratus responden. Penentuan jumlah responden dilakukan menggunakan rumus Slovin sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dalam rangka menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Terdapat 100 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan profesi dan diambil secara acak dengan menggunakan rumus Slovin, $[n=N/(1+N \cdot e^2)]$ dengan taraf nilai error 10% sesuai dengan perhitungan $N = 117.524$ $e = 10\%$ atau 0,10 .

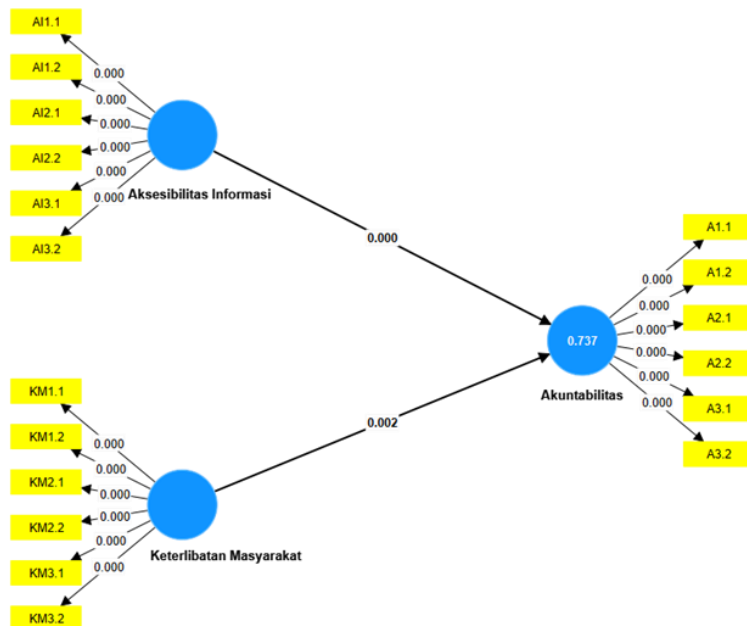
$$n = 117.524 / (1 + 117.524 \cdot (0,10)^2) \quad n = 117.524 / (1 + 117.524 \cdot 0,01)$$
$$n = 117.524 / (1 + 1.175,24) \quad n = 117.524 / 1.176,24$$
$$n = 99,91$$

- **Hipotesis**

Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas guna memastikan bahwa setiap item yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti, serta melalui uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen tersebut.

Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Terdapat dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini: *Pertama*, bahwa aksesibilitas informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keterbukaan informasi publik. *Kedua*, keterlibatan masyarakat berperan positif dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas tersebut. Dua hipotesis ini menjadi dasar dalam analisis selanjutnya untuk memahami hubungan antarvariabel dalam konteks tata kelola pemerintahan di Kelurahan Cikande.

Gambar 1. Uji Hipotesis Penelitian



HASIL

Hasil analisis terhadap survei yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah lulusan SMA/SMK dan berusia antara 17-22 tahun. Profil demografis ini memberikan insight tentang kelompok masyarakat yang berpotensi lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan informasi publik, serta menyoroti pentingnya pendidikan sebagai faktor pendorong.

Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat diandalkan dan mengukur variabel yang diteliti dengan tepat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga dapat dipastikan keakuratan data yang diperoleh.

Hasil analisis dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Temuan ini terlihat dari nilai *t-statistics* sebesar 3,928 dan *p-value* 0,000.

Tabel 1. Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Aksesibilitas Informasi -> Akuntabilitas	0,508	3,928	0,000
Keterlibatan Masyarakat -> Akuntabilitas	0,390	3,052	0,002

Berdasarkan hasil terhadap uji hipotesis pada Tabel 1, maka bisa dinyatakan bahwa semakin mudah masyarakat memperoleh informasi, semakin tinggi pula akuntabilitas yang dapat mereka rasakan dari lembaga publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Dengan nilai *t-statistics* sebesar 3,052 dan *p-value* 0,002,

Hasil ini menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan merupakan elemen kunci yang mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik. Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut memperlihatkan bahwa transparansi dan partisipasi publik saling berkelindan dalam membangun tata kelola yang lebih akuntabel.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande berada dalam kategori "sedang", dengan skor IKIP nasional sebesar 74,43 pada tahun 2022, meningkat dari 71,37 di tahun 2021. Kategori ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi masih banyak ruang untuk perbaikan dalam keterlibatan masyarakat dan aksesibilitas informasi. Keterbatasan ini terjadi karena publikasi resmi dari Komisi Informasi Pusat (KI) masih terbatas pada periode tersebut, sementara data dengan cakupan lebih panjang belum tersedia secara rinci di tingkat daerah. Hambatan lain juga muncul dari belum meratanya infrastruktur sistem informasi publik di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Cikande, yang berdampak pada keterlambatan pendokumentasian dan pelaporan. (catatan: tolong dijelaskan, apa maksud moderat ini dan ukurannya apa. Sebaiknya ditampilkan dengan data pendukungnya). Hal ini menandakan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan akses informasi, namun partisipasi aktif masyarakat

masih mengalami berbagai kendala. Karenanya, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat agar dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan mereka.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi adalah aksesibilitas informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin baik akses masyarakat terhadap informasi, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dirasakan. Akses yang baik terhadap informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif. Namun persoalannya, masih banyak informasi yang sulit diakses oleh masyarakat, baik karena keterbatasan infrastruktur teknologi maupun kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak mereka atas informasi tersebut (Norris, 2001; Wahyudi, 2021; Putri, 2021).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam proses pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak warga yang merasa suaranya tidak didengar atau tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara masih perlu ditingkatkan. Pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dalam pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran ini.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Di Desa Cikande, terdapat pandangan bahwa pengambilan keputusan adalah domain pemerintah, dan masyarakat hanya sebagai penerima kebijakan. Pandangan ini mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah diperlukan untuk menciptakan dialog yang terbuka dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya akan meningkatkan tingkat kepercayaan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan (Sari, 2020; Syafrudin, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu maupun kemampuan. Banyak warga yang memiliki kesibukan sehari-hari yang membuat mereka sulit untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memudahkan partisipasi, seperti forum komunikasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi *mobile* atau platform media sosial, dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan memudahkan mereka dalam memberikan masukan.

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pemerintah perlu untuk lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Transparansi tidak hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan penyederhanaan bahasa dan

format informasi yang disajikan agar lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting. LSM dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu dalam sosialisasi kebijakan, serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande, Kabupaten Serang. Hasil yang diperoleh menunjukkan pentingnya upaya sinergis antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan aksesibilitas informasi, memperkuat kesadaran masyarakat, dan menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif, kita dapat mencapai tujuan keterbukaan informasi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande berada dalam kategori moderat. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan akses informasi, partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Semakin baik masyarakat dapat mengakses informasi, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dirasakan oleh warga.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Partisipasi yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sangat penting untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran sosial, serta kurangnya fasilitas teknologi informasi, yang menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis dari Desa Cikande untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menjadi hal yang krusial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks keterbukaan informasi publik di tingkat desa, serta mendorong praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini merekomendasikan dikembangkannya penelitian serupa pada wilayah desa atau kecamatan dengan melakukan *mix method* dengan perluasan untuk memberikan perbandingan dan generalisasi hasil yang lebih luas, terutama untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2019). Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus di Kelurahan Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 85–99.
- Andriani, L. (2017). Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik: Tantangan dan Peluang di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 7(3), 125–140.
- Aritonang, E. (2019). *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penduduk Kelurahan Cikande*. <https://www.bps.go.id>
- Fadli, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123–135.
- Fauzi, A. (2018). Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(2), 60–75.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Putri, S. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(1), 45–60.
- Sari, R. (2020). Pengaruh Akses Informasi terhadap Partisipasi Masyarakat di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 201–215.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business* (7th ed.). Wiley.
- Sihombing, R. (2021). *Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Transparency in government*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suryadi, T. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 87–102.
- Syafrudin, M. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 15(3), 50–68.

- Wahyudi, R. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(2), 105–120.
- Widodo, H. (2022). Tantangan dan Peluang Keterbukaan Informasi di Era Digital. *Jurnal Komunikasi*, 12(4), 300–315.